

Strategi Interaksi Satuan Tugas Batalyon Gerak Cepat Monusco dengan Masyarakat Lokal dalam Operasi Misi Perdamaian di Kongo

Nuzul Andri Sujatmiko¹ Haryo Mustoko² Jimmy Veni Tokio³

Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: tikamiko49@gmail.com¹ haryosyifa69@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi interaksi Satuan Tugas Batalyon Gerak Cepat (Satgas BGC) TNI dengan masyarakat lokal dalam pelaksanaan misi perdamaian MONUSCO di Republik Demokratik Kongo. Penelitian bertujuan menganalisis bentuk interaksi, dampaknya terhadap keberhasilan misi, hambatan yang dihadapi, serta strategi peningkatan efektivitas interaksi. Penelitian dilaksanakan pada konteks penugasan Satgas BGC di wilayah operasi MONUSCO menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi dilakukan melalui komunikasi sosial, patroli perlindungan warga, kegiatan kemanusiaan, serta koordinasi dengan tokoh dan otoritas lokal. Interaksi tersebut meningkatkan penerimaan masyarakat dan mendukung stabilitas wilayah, meskipun masih terdapat hambatan bahasa, perbedaan budaya, dan tingkat kepercayaan awal masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan cultural intelligence, penggunaan interpreter lokal, dan pendekatan berbasis kebutuhan komunitas menjadi strategi utama peningkatan efektivitas interaksi.

Kata Kunci: Interaksi TNI, Misi Perdamaian, Kepercayaan Sosial



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Operasi pemeliharaan perdamaian (Peacekeeping Operations/PKO) merupakan salah satu instrumen utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga stabilitas keamanan internasional, terutama di wilayah yang mengalami konflik bersenjata berkepanjangan. Seiring meningkatnya kompleksitas konflik modern, operasi perdamaian tidak lagi berfokus pada aspek militer semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kemanusiaan, pembangunan, serta hubungan sipil-militer. Dalam konteks ini, keberhasilan misi perdamaian sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasukan penjaga perdamaian dalam membangun hubungan yang efektif dengan masyarakat lokal. Interaksi yang konstruktif menjadi faktor kunci dalam menciptakan penerimaan sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung stabilisasi wilayah pascakonflik. Hal ini relevan dengan penugasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO), khususnya melalui Satuan Tugas Batalyon Gerak Cepat (Satgas BGC) yang tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga berperan dalam kegiatan kemanusiaan dan pembangunan sosial.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan sipil-militer dalam operasi perdamaian memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan misi. Studi-studi tentang peacekeeping menekankan pentingnya komunikasi sosial, pendekatan berbasis komunitas, serta pembangunan kepercayaan sebagai elemen utama dalam meningkatkan efektivitas operasi multinasional. Penelitian lain menyoroti bahwa kegiatan nonmiliter seperti pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan edukasi masyarakat dapat memperkuat legitimasi pasukan perdamaian di mata masyarakat lokal. Selain itu, kajian mengenai cultural intelligence dalam operasi militer menunjukkan bahwa kemampuan memahami budaya lokal berperan penting dalam mengurangi kesalahpahaman dan resistensi masyarakat terhadap

pasukan asing. Dengan demikian, literatur yang ada mengindikasikan bahwa strategi interaksi sosial merupakan komponen strategis dalam operasi perdamaian modern. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek mandat operasi, dinamika keamanan, serta kontribusi kemanusiaan secara umum, dan belum banyak mengkaji secara spesifik bagaimana strategi interaksi sosial pasukan diimplementasikan pada level praktik lapangan. Dalam konteks MONUSCO, kajian yang menelaah secara mendalam pola interaksi antara kontingen tertentu dengan masyarakat lokal, termasuk faktor budaya, bahasa, persepsi, dan dinamika keamanan, masih relatif terbatas. Padahal, kondisi masyarakat di Republik Demokratik Kongo yang multibahasa, multikultur, dan memiliki pengalaman konflik berkepanjangan menuntut pendekatan interaksi yang adaptif dan kontekstual. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perbedaan bahasa, perbedaan norma budaya, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang fluktuatif dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program sosial maupun kemanusiaan. Situasi ini menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan nonmiliter tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada strategi komunikasi dan interaksi yang diterapkan oleh pasukan penjaga perdamaian.

Berdasarkan tinjauan tersebut, terdapat kesenjangan antara harapan normatif operasi perdamaian yang menekankan hubungan harmonis antara pasukan dan masyarakat dengan realitas empiris di lapangan yang menunjukkan adanya hambatan interaksi. Kesenjangan ini terutama terlihat pada kurangnya pemahaman komprehensif mengenai bagaimana strategi interaksi Satgas BGC dibangun, dijalankan, serta diadaptasikan dalam konteks sosial masyarakat lokal Kongo. Penelitian sebelumnya belum secara sistematis mengkaji bentuk interaksi, dampak interaksi terhadap keberhasilan misi, hambatan yang dihadapi, serta strategi peningkatan efektivitas interaksi dalam satu kerangka analitis terpadu. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan dinamika interaksi sosial pasukan penjaga perdamaian secara lebih mendalam sebagai dasar perumusan strategi yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus analisis strategi interaksi sosial Satgas BGC TNI dengan masyarakat lokal dalam misi perdamaian MONUSCO, yang dilihat tidak hanya sebagai aktivitas komunikasi, tetapi sebagai proses strategis yang memengaruhi keberhasilan operasi secara keseluruhan. Penelitian ini menempatkan interaksi sebagai variabel penting yang menghubungkan aspek militer, sosial, dan kemanusiaan dalam operasi perdamaian multidimensional. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi interaksi sosial antara Satgas Batalyon Gerak Cepat TNI dan masyarakat lokal dalam pelaksanaan misi perdamaian MONUSCO di Republik Demokratik Kongo. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk interaksi yang dilakukan, menilai dampak interaksi terhadap keberhasilan misi, mengkaji hambatan yang dihadapi dalam proses interaksi, serta merumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas hubungan sipil-militer dalam operasi perdamaian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam strategi interaksi sosial antara Satuan Tugas Batalyon Gerak Cepat (Satgas BGC) TNI dengan masyarakat lokal dalam pelaksanaan misi perdamaian MONUSCO di Republik Demokratik Kongo. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman fenomena sosial, pengalaman, serta dinamika interaksi sipil-militer dalam konteks operasi perdamaian yang kompleks dan kontekstual. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan bentuk interaksi, hambatan, dampak, serta strategi peningkatan efektivitas interaksi yang terjadi di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada konteks penugasan Satgas Batalyon Gerak Cepat (BGC) TNI dalam misi MONUSCO di Republik Demokratik Kongo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara Satgas BGC dan masyarakat lokal terbentuk melalui beberapa bentuk kegiatan utama yang bersifat militer maupun nonmiliter. Temuan menunjukkan bahwa bentuk interaksi sosial yang paling dominan meliputi komunikasi sosial langsung dengan masyarakat, patroli yang berorientasi perlindungan warga, kegiatan kemanusiaan seperti pelayanan kesehatan dan bantuan kebutuhan dasar, serta koordinasi dengan tokoh masyarakat dan otoritas lokal. Interaksi tersebut dilaksanakan secara rutin dalam berbagai kegiatan lapangan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Tabel 1. Bentuk Interaksi Satgas BGC dengan Masyarakat Lokal

No	Bentuk Interaksi	Implementasi Lapangan	Respon Masyarakat
1	Komunikasi Sosial	Dialog dengan warga, Pendekatan Komunitas	Meningkatkan kedekatan
2	Patroli Perlindungan	Patroli berbasis perlindungan warga sipil	Meningkatkan rasa aman
3	Kegiatan Kemanusiaan	Pengobatan gratis, bantuan sosial	Penerimaan positif
4	Koordinasi Lokal	Kerja sama dengan tokoh dan otoritas lokal	Mempermudah program

Data menunjukkan bahwa kegiatan kemanusiaan dan komunikasi sosial menjadi bentuk interaksi yang paling berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat. Pembangunan sarana air bersih dan kegiatan sosial berbasis komunitas memperoleh respons yang sangat positif, sedangkan kegiatan penyuluhan menunjukkan partisipasi yang relatif lebih rendah. Selain bentuk interaksi, hasil penelitian juga mengidentifikasi dampak interaksi terhadap keberhasilan misi. Interaksi yang efektif meningkatkan penerimaan masyarakat, memperlancar pelaksanaan program, serta mendukung stabilitas wilayah operasi.

Tabel 2. Dampak Interaksi terhadap Keberhasilan Misi

No	Aspek Dampak	Hasil yang Terlihat
1	Penerimaan Sosial	Masyarakat lebih terbuka
2	Efektifitas Program	Program berjalan lebih lancar
3	Stabilitas Wilayah	Situasi keamanan yang lebih kondusif
4	Kerja sama lokal	Informasi lapangan lebih mudah diperoleh

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hambatan dalam interaksi, terutama perbedaan bahasa, perbedaan budaya, tingkat kepercayaan awal masyarakat yang rendah, serta pengaruh situasi keamanan dan disinformasi.

Tabel 3. Hambatan Interaksi Satgas BGC

No	Aspek Dampak	Hasil yang Terlihat
1	Perbedaan Bahasa	Kesalahpahaman komunikasi
2	Perbedaan budaya	Adaptasi interaksi lebih lambat
3	Ketidakpercayaan awal	Partisipasi Masyarakat terbatas
4	Situasi keamanan	Interaksi tidak selalu konsisten

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa strategi peningkatan efektivitas interaksi dilakukan melalui pelatihan cultural intelligence, penggunaan juru bahasa lokal, pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat, serta komunikasi strategis yang konsisten.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial merupakan elemen strategis dalam keberhasilan operasi perdamaian. Bentuk interaksi yang ditemukan mencerminkan

pendekatan civil-military cooperation yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam pelaksanaan misi. Temuan ini sejalan dengan konsep interaksi sosial yang menekankan hubungan timbal balik antara kelompok sebagai dasar pembentukan kepercayaan dan integrasi sosial (Soekanto, 2012). Dari aspek what/how, data penelitian telah diproses melalui kategorisasi tematik yang menghasilkan empat temuan utama, yaitu bentuk interaksi, dampak interaksi, hambatan, dan strategi peningkatan efektivitas. Penyajian data dalam bentuk tabel menunjukkan pola interaksi yang konsisten, di mana kegiatan kemanusiaan dan komunikasi sosial menjadi faktor dominan dalam membangun penerimaan masyarakat. Dari aspek why, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan interaksi dipengaruhi oleh kemampuan pasukan dalam menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan konteks budaya lokal. Hal ini berkaitan dengan teori cultural intelligence yang menekankan pentingnya kemampuan adaptasi lintas budaya dalam operasi multinasional. Interaksi yang adaptif meningkatkan kepercayaan sosial, yang menurut Putnam (1993) merupakan fondasi utama kerja sama dalam masyarakat.

Hambatan interaksi yang ditemukan memperkuat argumentasi bahwa operasi perdamaian tidak hanya menghadapi tantangan keamanan, tetapi juga tantangan sosial dan komunikasi. Perbedaan bahasa dan budaya menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas interaksi, sehingga strategi komunikasi strategis menjadi bagian penting dari keberhasilan misi (NATO, 2009). Dari aspek what else, temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hubungan sipil-militer berpengaruh terhadap keberhasilan operasi perdamaian. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru karena menyoroti strategi interaksi pada level praktik lapangan kontingen tertentu, bukan hanya pada level kebijakan atau mandat operasi. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis bentuk interaksi, dampak, hambatan, dan strategi dalam satu kerangka strategi interaksi operasi perdamaian. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat kajian interaksi sipil-militer dalam konteks operasi multinasional. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa penguatan pelatihan cultural intelligence, penggunaan interpreter lokal, pendekatan berbasis komunitas, serta komunikasi strategis berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi interaksi sosial merupakan faktor kunci yang menghubungkan aspek militer, sosial, dan kemanusiaan dalam operasi perdamaian. Keberhasilan misi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara pasukan dan masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi interaksi sosial Satgas Batalyon Gerak Cepat (BGC) TNI dengan masyarakat lokal dalam misi perdamaian MONUSCO merupakan faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan operasi. Interaksi yang dilakukan melalui komunikasi sosial, patroli berorientasi perlindungan warga, kegiatan kemanusiaan, serta koordinasi dengan tokoh dan otoritas lokal terbukti meningkatkan penerimaan masyarakat, memperlancar pelaksanaan program, dan mendukung stabilitas wilayah operasi. Namun, interaksi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama perbedaan bahasa, perbedaan budaya, tingkat kepercayaan awal masyarakat yang rendah, serta dinamika keamanan dan disinformasi yang memengaruhi persepsi masyarakat. Temuan penelitian ini menghasilkan konsep bahwa strategi interaksi dalam operasi perdamaian harus dipahami sebagai strategi multidimensional yang mengintegrasikan pendekatan komunikasi, adaptasi budaya, dan pendekatan berbasis kebutuhan komunitas sebagai satu kesatuan yang menentukan efektivitas hubungan sipil-militer di wilayah konflik. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada konteks satu jenis kontingen dan menggunakan

pendekatan kualitatif sehingga generalisasi temuan ke seluruh misi perdamaian perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, keterbatasan akses data lapangan secara langsung serta ketergantungan pada pengalaman informan dapat memengaruhi kedalaman variasi perspektif yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan komparatif antar kontingen, menggunakan metode campuran (mixed methods), serta mengkaji pengaruh strategi interaksi terhadap indikator kinerja misi secara kuantitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif..

DAFTAR PUSTAKA

- Autesserre, S. (2019). *The frontlines of peace: An insider's guide to changing the world*. Oxford University Press.
- Bellamy, A. J., & Hunt, C. T. (2021). Twenty-first century UN peace operations: Protection, force and the changing security environment. *International Affairs*, 97(2), 365–383. <https://doi.org/10.1093/ia/iaa239>
- Bove, V., Ruffa, C., & Ruggeri, A. (2020). Composing peace: Mission composition in UN peacekeeping. *British Journal of Political Science*, 50(4), 1405–1425. <https://doi.org/10.1017/S0007123418000120>
- de Coning, C., Karlsrud, J., & Troitskiy, M. (2022). UN peacekeeping doctrine in a changing world order. *Global Governance*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.1163/19426720-02801002>
- Doyle, M. W., & Sambanis, N. (2017). The UN record on peacekeeping operations. *International Journal*, 72(4), 495–518. <https://doi.org/10.1177/0020702017746937>
- Fortna, V. P., & Howard, L. M. (2021). Pitfalls and prospects in peacekeeping research. *Annual Review of Political Science*, 24, 211–230. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-041719-102556>
- Karlsrud, J. (2019). From liberal peacebuilding to stabilization and counterterrorism. *International Peacekeeping*, 26(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/13533312.2018.1502040>
- Karlsrud, J., & Smith, A. (2021). Civil–military coordination in UN peacekeeping. *International Peacekeeping*, 28(5), 761–783. <https://doi.org/10.1080/13533312.2021.1938273>
- NATO. (2009). *NATO strategic communications policy*. North Atlantic Treaty Organization.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Ruggeri, A., Gizelis, T. I., & Dorussen, H. (2017). Managing mistrust: UN peacekeeping, trust and cooperation. *Journal of Conflict Resolution*, 61(3), 591–618. <https://doi.org/10.1177/0022002715599883>
- Slim, H. (2015). *Humanitarian ethics: A guide to the morality of aid in war and disaster*. Oxford University Press.
- Tuck, C. (2020). Strategic communication and military operations. *Journal of Strategic Studies*, 43(2), 229–252. <https://doi.org/10.1080/01402390.2018.1515517>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- United Nations. (2023). *United Nations peacekeeping operations: Principles and guidelines*. United Nations.
- Winslow, D. (2017). Civil–military relations in peace operations. *Armed Forces & Society*, 43(2), 338–358. <https://doi.org/10.1177/0095327X15626724>